

PEMETAAN RAGAM SOSIAL KULTURAL MASYARAKAT DI JAWA TIMUR DALAM HUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA DAN SOSIAL POLITIK

Naskah diterima Tgl. 13 September 2010, Naskah disetujui Tgl. 13 Oktober 2010

Irwantoro)*

ABSTRAK

Masyarakat Jawa Timur dibagi menjadi beberapa subkultur area besar antara lain masyarakat Jawa Mataraman, Arek, Madura dan Osing, di mana masing-masing subkultur area mempunyai kelebihan dan kekurangan yang berdampak pada proses pembangunan. Proses pembangunan seyogjanya dapat mengembangkan nilai-nilai budaya agar pembangunan itu sendiri memberi manfaat yang maksimal bagi kehidupan masyarakat. Dengan demikian pembangunan harus menggunakan pendekatan yang memperhatikan aspek kultur masyarakat yang bersangkutan agar masyarakat dapat menikmati kemajuan tanpa kehilangan akar historis kulturalnya.

Kata kunci : proses pembangunan, budaya masyarakat, pemetaan budaya

ABSTRACT

East Javanese society was divided several subcultures large areas such as Java community Mataraman, Arek, Madura and Osing, where each subcultural area has its advantages and disadvantages that impact on the development process. The development process should be able to develop cultural values for development itself benefits maximum benefits to people's lives. Thus development should use the approach that takes into account the relevant aspects of community culture so that people can enjoy progress without losing the historical cultural roots.

Key word : development process, community culture, mapping cultures

PENDAHULUAN

Ditinjau dari kesejarahannya, Jawa Timur memiliki riwayat yang panjang mulai dari zaman prasejarah, kerajaan-kerajaan hindu (Singosari dan Majapahit), pengaruh kerajaan Mataram (Islam) hingga bercokolnya kolonialisme Belanda. Proses dialektik historis dari zaman ke zaman yang terjadi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan

kebudayaan di Jawa Timur, sekaligus merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan sehubungan dengan perkembangan dan perubahan masyarakat di Jawa Timur.

Jawa Timur dapat dibagi menjadi beberapa sub-culture area besar yang terdiri dari komunitas masyarakat Jawa Mataraman, Arek, Madura dan Osing.

**) Penulis adalah Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur*

Subkultur area Madura sekaligus juga merupakan suku bangsa Madura, sedangkan yang lainnya masih dianggap atau menganggap sebagai suku bangsa Jawa.

Subkultur area Madura tersebar di beberapa kabupaten di pantai utara Pulau Jawa bagian timur yaitu Pasuruan, Probolinggo, Situbondo sampai masuk ke Bondowoso, Jember dan Lumajang. Bahkan di berbagai wilayah itu, citra Madura lebih menonjol dibandingkan Jawa. Perpindahan penduduk dari Pulau Madura ke daerah-daerah tersebut terkait dengan aspek ekonomi maupun aspek politis sehubungan dengan kebijakan kolonial sejak VOC lalu, seperti tanam paksa dan seterusnya (Jonge, 1989).

Subkultur area Mataraman merupakan kawasan yang dipengaruhi oleh tradisi budaya Kediri, Blitar dan daerah delta Sungai Brantas yang pada abad ke-17 hingga abad ke-18 secara politis ada dalam hegemoni kekuasaan Mataram (Koentjaraningrat, 1994) dan pada akhirnya secara sosio kultural kawasan dimaksud terintegrasi dalam kebudayaan Jawa sehingga dikenal dengan sebutan Mataraman.

Subkultur area Arek meliputi daerah Surabaya, Gresik, Lamongan, Mojokerto dan Jombang dimana ekspansi Mataram di kawasan ini rupanya tidak secara penuh berhasil mengintegrasikannya dalam sistem nilai kebudayaan Jawa. Subkultur area Osing terdapat di wilayah ujung Pulau Jawa yang dulu dikenal sebagai wilayah kekuasaan Kerajaan Blambangan yang berulang kali diserang oleh Kerajaan Mataram namun sampai Mataram runtuh

Blambangan tidak pernah ditaklukan sehingga identitas kultural Osing menjadi sedemikian spesifik dan menjadi identitas budaya dari subkultur area Osing, kini wilayah kerajaan Blambangan menjadi wilayah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan sebagian di wilayah Kabupaten Jember, menurut Scholte istilah osing menunjuk pada bahasa mereka yakni pemakaian kata *sing* 'tidak' yang berbeda dengan bahasa Jawa *ora* 'tidak' (Herususanto, 1993:2).

Di samping itu terdapat komunitas Tengger yang mendiami lereng pegunungan Bromo, yang secara administratif masuk wilayah Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Malang dan Lumajang. Ditunjang dengan letak geografisnya yang eksklusif, komunitas Tengger menjadi komunitas kebudayaan yang spesifik. Komunitas lain yang dipandang cukup spesifik dilihat dari segi historis adalah komunitas Samin yang berada di Kabupaten Bojonegoro, komunitas tersebut muncul dari gerakan Saminisme yang dipelopori oleh Samin Surantiko (1859 - 1914) sebagai bentuk resistensi terhadap kekuasaan kolonial.

Kemajuan pembangunan yang dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam bidang transportasi, komunikasi dan teknologi secara langsung maupun tidak langsung membawa perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat. Mobilitas penduduk yang tinggi membuka peluang terjadinya pergeseran atau perubahan tata nilai budaya masyarakat Jawa Timur yang pada gilirannya akan mempengaruhi pandangan-pandangan dan tingkat

apresiasi warga masyarakat terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan pembangunan sebagai proses sosial. Pergeseran tata nilai budaya masyarakat Jawa Timur dapat menuju ke arah yang positif, namun juga dapat menuju ke arah yang negatif. Dampak positif kemajuan pembangunan terhadap kehidupan masyarakat, antara lain kesadaran untuk mendapatkan pendidikan formal cukup baik, tingkat kesehatan yang maju pesat dan teknologi komunikasi dan transportasi yang menjangkau berbagai daerah.

Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan, antara lain semakin pudarnya kesenian maupun kebudayaan tradisional dan nilai-nilai tradisional lainnya. Idealnya proses pembangunan seyogyanya dapat mengembangkan nilai-nilai budaya agar pembangunan itu sendiri memberi manfaat yang maksimal bagi kehidupan masyarakat. Dengan demikian pembangunan harus menggunakan pendekatan yang memperhatikan aspek kultur masyarakat yang bersangkutan agar masyarakat dapat menikmati kemajuan tanpa kehilangan akar historis kulturalnya.

Penelitian ini berkaitan dengan kebudayaan non-fisik atau kebudayaan idea, yang disebut juga adat tata kelakuan yang berfungsi sebagai tata kelakuan yang mengatur, mengendalikan, dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat (Kontjoroningrat, 1996). Dalam perspektif kebudayaan, wilayah kebudayaan non-fisik merupakan aspek vital dan strategis di mana masyarakat 'penganutnya' menghayati dan mengaktualisasikannya

dalam kehidupan nyata. Seiring dengan kemajuan zaman dan hasil pembangunan yang telah dicapai Provinsi Jawa Timur, kiranya perlu dilakukan pemetaan ragam budaya masyarakat Jawa Timur.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ragam budaya Jawa Timur yang ada pada saat ini;
2. Pada sisi mana kekuatan dan kelemahan masing-masing ragam budaya Jawa Timur dalam hubungannya dengan pembangunan.

Tujuan Penelitian ini mendiskripsikan tentang keanekaragaman (pemetaan) budaya masyarakat Jawa Timur yang ada pada saat ini dan mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing ragam budaya masyarakat Jawa Timur sehubungan dengan pembangunan.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sumenep, Kabupaten Kediri, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, dan Kota Surabaya di mana lima Kabupaten tersebut dipandang mewakili keanekaragaman dari sukultur area yang ada pada masyarakat Jawa Timur.

Penelitian ini bersifat kualitatif yang berupaya mendeskripsikan suatu gejala kebudayaan. Pengambilan data primer dilakukan melalui pengamatan dan wawancara mendalam (*indept interview*) dengan sejumlah informan yang diperoleh dengan teknik 'bola salju' (*snowball methods*), sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen, laporan hasil penelitian dan studi kepustakaan yang lain.

HASIL PENELITIAN

Secara geografis Kabupaten Banyuwangi berada di ujung timur Pulau Jawa yang bersebelahan dengan Pulau Bali, dahulu wilayah tersebut dikenal sebagai kekuasaan Blambangan yang di dalamnya terdapat masyarakat Osing (*wong osing*). Orang Osing sebagai mayoritas penduduk dewasa ini masih dapat ditemukan di Kecamatan Banyuwangi, Glagah, Giri, Kabat, Rogojampi, Singojuruh, Songgon, Cluring dan Genteng. Secara historis budaya masyarakat osing adalah subsistem budaya tradisional Jawa yang dalam kurun perkembangannya mengalami perubahan-perubahan sejalan dengan dinamika masyarakat Jawa. Dalam konteks ini budaya osing tampak lebih dekat dengan sosok budaya pra-Mataram yang bercorak Hindu-Jawa (Magnis Suseno, 1984:29-30).

Praktik gotong royong bagi masyarakat osing dilaksanakan dalam dua macam kategori pekerjaan berdasarkan motifnya, yaitu pekerjaan yang bermotif demi kepentingan seluruh warga desa dan pekerjaan yang bermotif saling membantu antar sesama baik dalam bentuk materi maupun tenaga (Zainudin, 1996). Praktik gotong royong jenis pertama, misalnya perbaikan irigasi, perbaikan dan pembersihan jalan desa serta pembersihan kuburan. Masyarakat osing menyebut praktik gotong royong yang mengacu pada kepentingan umum ini dengan *ngayak*. Gotong royong jenis ini bersifat terpimpin dalam arti ada semacam instruksi, biasanya dari pemerintah desa, dimana setiap anggota masyarakat yang dianggap dewasa terlibat *ngayak*, tetapi diakui bahwa

tidak ada sanksi bagi yang tidak terlibat *ngayak* atau sanksi itu sangat longgar.

Hal ini sangat berbeda dengan gotong royong jenis kedua yang bermotif saling membantu, misalnya mendirikan rumah, mengerjakan sawah dan menyelenggarakan upacara terutama perkawinan. Pengertian saling membantu dalam hal ini bukan hanya dalam bentuk materi tetapi juga tenaga. Bantuan atau sumbangan terutama dalam bentuk materi tersebut dicatat dan bersifat mengikat, artinya sumbangan itu kelak juga akan dikembalikan pada saat si penyumbang mempunyai hajat sesuai dengan jumlah atau besar yang diterimanya. Didalamnya terdapat sanksi psikologis, karena orang osing merasa malu jika tidak menyumbang balik kepada mereka yang pernah menyumbanginya. Sifat resiprositas demikian sesungguhnya telah berlangsung sejak zaman dahulu dan menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada yang cuma-cuma meskipun hal itu berbunyi bantuan atau sumbangan (Mauss, 1992)

Kabupaten Kediri merupakan salah satu daerah tertua di Provinsi Jawa Timur yang pada awalnya terbentuk sebagai sebuah teritorial yang memiliki tata pemerintahan yang didalamnya berkembang kebudayaan leterer secara signifikan sejak pertengahan abad ke 11. Spesifikasi kebudayaan leterer melalui cerita-cerita panji tampaknya merupakan tonggak pertama mulai dikembangkannya tradisi sastra lisan dan sastra tertulis di tanah Jawa. Kediri muncul dalam lintasan sejarah Indonesia bersamaan dengan ekspansi Kerajaan Mataram (Islam) dalam menaklukkan di wilayah timur kekuasaan

Mataram. Wilayah manca negara dalam hal ini Kabupaten Kediri yang dalam perkembangannya kemudian komunitas masyarakatnya populer disebut sebagai Mataraman lebih menunjukkan kedekatannya secara kultural dengan kebudayaan Jawa jika dibandingkan dengan subkultur area lainnya di Jawa Timur.

Kota Surabaya sebagai daerah yang mewakili subkultur area arek merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur. Secara historis Kota Surabaya telah menunjukkan dinamikanya sejak adanya keberadaan kerajaan-kerajaan hindu di Jawa Timur, kejayaan Majapahit dalam menaklukan wilayah-wilayah nusantara salah satunya ditopang oleh dan dari keberadaan Pelabuhan Ujung Galuh yang dipastikan berada di Surabaya sekarang. Posisi Surabaya yang menjadi kota pelabuhan yang telah berlangsung sekitar 10 abad merupakan tempat bertemunya berbagai etnik bahkan bangsa dari berbagai penjuru sehingga menjadikan masyarakatnya terbuka (ekstrovet) dalam bersentuhan dengan kultur baru.

Menurut para informan pola komunikasi verbal sehari-hari dipastikan selalu menggunakan bahasa Jawa dialek suroboyoan yang tampaknya menjadi simbol identitas kultur area arek, selain itu tradisi *slametan* juga masih dilakukan oleh masyarakat sub kultur arek walaupun jenis dan tata caranya tidak lagi sebanyak yang dilakukan oleh masyarakat jawa Mataraman. Pola-pola tentang etika tolong menolong menurut para informan masih nampak berlangsung di Surabaya meskipun bersifat terbatas yang

memungkinkan orang bersolidaritas terhadap orang lain misalnya pada saat orang punya hajat atau tertimpa musibah, sedangkan untuk hal-hal lain sudah terkalahkan oleh "ideologi" uang. Sebenarnya hal ini lebih menunjukkan watak manusia sebagai mahluk sosial yang toleran terhadap sesama, dimana semakin individualnya perilaku sosial masyarakat membuktikan bahwa mobilisasi sosial menjadi sulit dan jarang terjadi, terkecuali untuk kasus-kasus seperti tersebut di atas.

Kabupaten Sumenep adalah merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Madura. Dari sudut ekologi budaya Madura memiliki corak budaya yang khas sebagai masyarakat pantai yang tentunya berbeda dengan corak budaya Jawa sebagai masyarakat agraris sehingga mengonstruksi budaya Madura yang kehidupannya penuh dengan tantangan yang mengakibatkan nilai budaya yang diproduksi juga berkisar pada nilai budaya yang memantulkan sikap dan perilaku sosial yang memiliki keberanian yang tinggi, mejunjung tinggi martabat dan harga diri, berjiwa keras dan ulet dalam menghadapi tantangan kehidupan. Akibat sikap yang peka terhadap martabat dan harga diri itu dalam kehidupan sosial sering kali tumbuh perilaku sosial yang mengundang konflik, karena itu masyarakat Madura seolah-olah diwarnai oleh kekerasan dan darah. Tindak kekerasan seolah-olah merupakan sesuatu yang bersifat keseharian sehingga melahirkan pernyataan-pernyataan stereotip mengenai orang Madura yang cepat marah dan ringan tangan untuk membunuh orang lain (Touwen-Bourwsma, 1989).

Sikap hidup masyarakat Madura yang berorientasi menjunjung martabat dan harga diri tercermin dalam ungkapan *angoan potea tolang etembang pote mata* (lebih baik mati daripada menanggung rasa malu). Bahkan, budaya *carok* yang khas bagi laki-laki Madura pun dilakukan schubungan dengan harga diri terutama gangguan terhadap istri (perempuan) yang menyebabkan orang Madura merasa terhina, *malo* (Wiyata,2001). Di samping itu slametan juga menjadi tradisi Madura, menurut salah satu informan untuk memulai suatu kegiatan mendirikan bangunan yang dikategorikan besar masih sering dibuatkan "tumbal" kepala sapi, di mana semua itu terkait dengan kekuasaan di luar diri manusia dan keinginan memperoleh keselamatan diri manusia dan keinginan memperoleh keselamatan dalam menjalani hidup.

Kabupaten Jember adalah kabupaten yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda yang bermaksud membuka lahan perkebunan, sehingga terjadi arus migrasi yang semakin tinggi dengan dibukanya lahan perkebunan tersebut, sehingga pada tahun 1866 penduduk daerah Jember mencapai 44.043 jiwa (orang Madura), 23.822 jiwa (orang Jawa) dan 1580 jiwa (orang Osing) (Arifin, 1989), padahal pada tahun 1845 penduduk Jember masih berjumlah 29.969 jiwa. Oleh karena itu wajar bila daerah Jember dewasa ini dihuni oleh mayoritas orang Madura dan orang Jawa. Orang Madura berbondong-bondong memasuki daerah Jember kemudinan menetap dan beranak pinak menjadi penduduk Jember, begitu pula dengan orang Jawa dari daerah sekitar

Madiun, Kediri, Trenggalek dan Ponorogo (daerah mancanegara sebelah timur dalam tata ruang Kerajaan Mataram).

Di wilayah Kabupaten Jember orang Madura dan orang Jawa saling mengenal dan hidup berdampingan dan bahkan terjadi perkawinan antara warga Madura dan Jawa sehingga terjadi saling pengaruh antara budaya Madura dan Jawa yang dalam konteks ini dikenal sebutan "Pendalungan" yang maksudnya menunjuk pada konstruksi budaya dari dua latar belakang budaya, yakni Madura dan Jawa, baik melalui perkawinan maupun hubungan yang insentif antara dua pendukung budaya itu. Pendalungan sebagai konstruksi budaya yang mempertemukan budaya Madura dan Jawa dengan sendirinya juga masih membawa warna budaya induknya, citra santri dan tradisi *slametan* yang melekat pada masyarakat Madura dan Jawa juga terbawa dalam masyarakat Jember (Pendalungan).

PEMBAHASAN

Keragaman budaya masyarakat Jawa Timur dapat dipetakan kedalam beberapa kategori orientasi antara lain :

Nilai Dasar

Corak masyarakat di Jawa Timur sebagai masyarakat agraris pada umumnya sangat mempengaruhi pembentukan nilai dasar yang menjadi orientasi utama masyarakat. Dalam konteks hubungan dengan alam masyarakat agraris memiliki ciri yang sama, yaitu rasa kekaguman dan ketidakberdayaan melihat keajaiban gejala alam. Perkiraan dan spekulasi mereka tentang kekuatan yang berada di balik keajaiban alam tersebut membuat mereka

mengembangkan suatu sistem kepercayaan yang erat kaitannya dengan kekuatan gaib. Ritus *slametan* maupun perhitungan hari baik/buruk yang masih diikuti masyarakat di Jawa Timur, baik Mataraman, Arek, Osing, Pendalungan maupun Madura menggambarkan kosmologi mereka tentang adanya konstalasi kekuatan gaib di balik kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu terdapat suatu nilai dasar yang menjadi orientasi utama dalam hidup sehari-hari masyarakat, yaitu "rukun". Konsep rukun memang menjadi inti atau dasar budaya masyarakat di Jawa Timur, baik yang merupakan varian atau subbudaya Jawa maupun Madura.

Tradisi gotong royong yang masih mewarnai masyarakat di Jawa Timur meskipun terdapat perubahan-perubahan, merefleksikan nilai dasar rukun tersebut. Karena nilai dasar rukun itu pula di Indonesia pada umumnya dan Jawa Timur pada khususnya terdapat tradisi mudik yang sangat khas, di daerah asalnya mereka berkumpul dengan sanak keluarga lain, dimana mereka saling bercerita tentang kehidupan yang dijalani dan juga rencana-rencana dan harapannya di kemudian hari dan tak jarang pada saat berkumpul tersebut akan terjadi musyawarah keluarga, saling memberikan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi setiap anggota keluarga bahkan menyelesaikan konflik jika muncul diantara mereka karena situasi sosial tertentu.

Peristiwa tersebut mengingatkan kembali makna sistem pertalian kekeluargaan di Jawa, yang oleh Hildre Geertz (1985) disebut *somah*. Perubahan sosial yang melanda masyarakat memaksa

mereka untuk sementara meninggalkan kesatuan dasar keluarga, di antaranya terungkap dalam bentuk struktur sistem pertalian kekeluargaan. Ikatan kekeluargaan dan persaudaraan yang tadinya seperti terputus oleh jarak geografis maupun sosial dapat dipulihkan kembali secara utuh.

Konsep rukun bukan berarti harus menegasikan atau tidak boleh ada kepentingan yang bertentangan antara dua belah pihak, melainkan konsep rukun justru mengafirmasi atau mengakui adanya kepentingan yang berbeda. Hanya saja yang dituntut dalam konsep rukun adalah agar seseorang dapat menguasai diri dan jangan membiarkan sesuatu bertabrakan secara terbuka. Bagaimanapun perbedaan kepentingan yang muncul dari dua belah pihak masyarakat menuntut agar warganya dapat mengendalikan diri dan berlaku rukun.

Nilai dasar memiliki arti positif dan sangat mendukung bagi pembangunan demokrasi. Dengan nilai dasar ini masyarakat justru dapat menerima perbedaan tanpa menjadikannya sumber perpecahan. hal ini merupakan prinsip dasar bagi kehidupan demokrasi. Meskipun demikian tidak mustahil timbul kesalahan penafsiran. Mengutamakan kerukunan bisa saja ditafsirkan sebagai antiperbedaan sebagaimana penafsiran pemerintah Orde Baru selama ini. Akibatnya nilai dasar rukun yang diterjemahkan sebagai persatuan-kesatuan justru dipakai sebagai klaim kultural untuk menegasi perbedaan dan demokrasi. Nilai dasar itu lalu menjadi ideologi untuk menolak gagasan demokratisasi. Oleh

karena itu perlu ditegaskan bahwa mengutamakan kerukunan bukan menegasi perbedaan.

Vertikal-Hirarkis

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orientasi budaya yang terpola secara vertikal-hirarkis. Orientasi budaya yang bersifat vertikal-hirarkis ini sangat memperhatikan perbedaan status sosial seseorang terutama tampak pada masyarakat Jawa Timur subkultur Jawa Mataraman yang dulunya dikenal dengan sebutan mancanegara dan subkultur Madura. Keduanya sangat diwarnai budaya Jawa yang berpusat di Yogyakarta-Surakarta yang dulu menjadi pusat kerajaan Mataram.

Di Madura pengaruh budaya tersebut menghasilkan struktur *parjaji* dan *oreng kenek*, begitu pula di Jawa Mataraman terdapat struktur *parjaji* juga memiliki peranan yang sangat besar dan memperoleh hak-hak istimewa. Struktur demikian memang tidak sepenuhnya utuh masih bertahan, tetapi orientasi vertikal-hirarkis masih tampak mewarnai budaya Jawa Mataraman di sekitar Madiun-Kediri yang semakin melmah ke arah timur, dan budaya Madura terutama di Sumenep yang semakin melemah ke arah barat. Disamping itu khususnya di Madura pengaruh Jawa yang vertikal-hirarkis melahirkan sikap dan perilaku sosial yang menempatkan ulama atau kyai sebagai sentral yang ekuivalen dengan status priyayi dalam masyarakat Jawa. Orientasi budaya yang bersifat vertikal-hirarkis ini diantaranya tampak dari bahasa yang digunakan, baik di daerah Jawa Mataraman maupun di

daerah Sumenep yang sama-sama mengenal sistem tingkat tutur.

Orientasi vertikal-hirarkis yang terpola secara vertikal-hirarkis tersebut kurang mendukung gerak masyarakat ke depan menuju masyarakat yang maju dan demokratis yang mensyaratkan kemandirian anggotanya. Peranan elit sangat kuat dan menentukan agenda banyak orang, perubahan sosial pun akan banyak bergantung pada kehendak elit. Apapun yang disetujui elit dapat dengan mudah diterima dan diikuti warga masyarakat. Oleh karena itu orientasi vertikal-hirarkis dapat menjadi penghambattumbuhnya tradisi kritik atau beda pendapat yang lazim dalam masyarakat maju dan demokratis.

Horisontal-Egaliter

Masyarakat Jawa Timur dari subkultur Arek yang tersebar di sekitar Surabaya dan wilayah pesisir utara, subkultur Osing yang tersebar di Banyuwangi dan sebagian Jember (juga masyarakat tengger) cenderung bersifat horisontal-egaliter dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat dari subkultur tersebut tampaknya memahami realitas sosial bukan secara hirarkis. Perbedaan status sosial masih tetap ada dan menjadi realita, namun status sosial yang melekat pada diri seseorang tidak menjadi pola hubungan sosialnya, pola hubungan sosialnya bersifat horisontal atau setara.

Orientasi nilai budaya yang bersifat horisontal-egaliter di antaranya tampak dari penggunaan bahasa masyarakat dari subkultur arek, Pandalungan dan Osing. Masyarakat dari subkultur ini tidak

mengenal tingkat tutur yang mengacu pada aspek stratifikasi sosial yang hirarkis tetapi hanya mengenal santun bahasa yang dipakai dalam konteks tertentu, mereka tidak terikat hirarki status sosial, tidak terikat tata krama dan sopan santun yang terpola secara hirarkis, semua orang diperlakukan sama. Seseorang dapat tampil sebagai dirinya dan hal ini merupakan sesuatu yang vital bagi pembangunan demokrasi.

Terbuka

Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang terbuka, sehingga setiap orang yang berhubungan dengan mereka pada umumnya terkesan oleh sifat keterbukaannya. Sifat terbuka dalam aktualisasi diri hampir dimiliki atau menjadi ciri nilai budaya masyarakat di Jawa Timur. Sifat terbuka ini muncul sebagai orientasi budaya Arek, Pendalungan, Osing, maupun Madura.

Orientasi nilai budaya yang bersifat terbuka tersebut tidak lepas dari sistem komunikasi yang bebas dari gestur penghormatan yang kompleks, tidak lagi terikat oleh kaidah halus-kasar, kromo-ngoko. Masyarakat di daerah persebaran budaya Arek, Pendalungan, Osing juga dapat melihat realitas sosial secara telanjang, apa adanya, sesuatu yang tidak akan terjadi dalam budaya Jawa. Perbedaan sosial tidak diterima sebagai jarak hirarkis yang membuat tidak seluruh realitas dapat dinyatakan secara telanjang tetapi harus disembunyikan atau diselubungi dan diberi topeng. Sehingga masyarakat di daerah persebaran budaya tersebut adalah bersifat terbuka dan oleh karenanya juga tidak suka

basa-basi. Hal tersebut terjadi pula pada masyarakat Jawa Timur dari kultur Madura, terutama dari luar Sumenep. Budaya Madura yang berakar pada tradisi masyarakat maritim tidak meninggalkan ciri khas masyarakat pantai yang terbuka.

Masyarakat yang nilai budayanya bersifat terbuka ini memang terkesan kasar dari sudut budaya yang mengenal kaidah halus-kasar, kromo-ngoko, tetapi mereka dapat mengaktualisasikan dirinya secara utuh. Mereka dapat memperbincangkan realitas sosial secara apa adanya. Oleh karena itu nilai budaya tersebut juga peka terhadap konflik sosial sebagai kondisi subyektif dalam arti mudah pecah sebagai konflik terbuka jika kondisinya memang benar-benar mendukung. Namun dalam konteks kemajuan dan perkembangan demokratisasi nilai budaya demikian sangat mendukung. Masyarakat yang maju dan demokratis mengutamakan kemandirian, sehingga sangat membutuhkan silai budaya yang terbuka sehingga memungkinkkan setiap anggota masyarakat tampil sebagai diri sendiri.

Tertutup

Dalam konteks aktualisasi diri, di samping terdapat nilai budaya yang berorientasi kepada keterbukaan yang tampaknya mendominasi masyarakat di Jawa Timur, juga terdapat nilai budaya yang bersifat tertutup. Pengertian tertutup bukan dalam arti masyarakat itu cenderung menutup diri terhadap seseorang yang dianggap asing, melainkan terdapat seperangkat nilai yang meregulasi tindakan social sehingga membutuhkan "topeng" (basa-basi) dalam aktualisasi diri.

Masyarakat Jawa Timur yang berorientasi demikian pada umumnya merupakan pendukung subkultur Jawa Mataraman.

Orientasi nilai yang bersifat tertutup ini terbentuk sejalan dengan kaidah halus-kasar, *kromo-ngoko* dalam dunia Jawa. Dalam perilaku sosial masyarakat Jawa sangat memahami dan menghayati kaidah ini, karena di dalamnya terdapat penilaian apakah seseorang bias dianggap dewasa secara mental atau belum. Seseorang dianggap dewasa secara mental - dalam istilah Jawa disebut *njawwa* atau *njawani* - jika seseorang itu memahami dan bias berperilaku sebagaimana ajaran dalam kaidah tersebut. Seseorang tahu dan paham dirinya serta tahu dan paham diri orang lain. Hal ini menjadi ajaran moral yang sangat penting dalam budaya Jawa: mengetahui dan memahami kapan seseorang *ngoko* dan *krama*, kapan seseorang boleh *misuh* dan bagaimana tata caranya.

Oleh karena itu, dalam budaya Jawa setiap tindakan selalu mengacu pada aktivitas yang eksklusif dan tidak bebas nilai. Tindakan dihayati tidak sebagai sesuatu yang terpisah dari realitas (dalam arti status sosial), di antara keduanya terdapat hubungan sosial yang saling membentuk. Bagi masyarakat Jawa hal ini dianggap penting demi kelangsungan dan keselamatan hidupnya.

Nilai dasar rukun yang dihayati orang Jawa sekaligus menyarankan agar seseorang juga selalu menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa mendatangkan ketidaktentraman, yang mengundang konflik. Tindakan yang *grusa-grusu* dan *sebrono*, yang tidak peka realitas dianggap mengganggu konflik. Budaya Jawa

mengajarkan agar manusia menjauhi tindakan yang mengundang konflik itu.

Mengingat etika itu, masyarakat Jawa cenderung menyembunyikan realitas sosial yang dianggap kasar dan mengundang konflik, lalu membungkusnya dengan sejumlah tindakan dan perkataan yang berkesan halus. Dengan perkataan lain, masyarakat Jawa Timur dari subkultur Jawa Mataraman masih berorientasi pada nilai yang melahirkan perilaku basa-basi, suatu masyarakat yang masih suka menggunakan "topeng". Secara metaforis bisa dijelaskan bahwa jika tidak memakai "topeng" wujud raut mukanya dikhawatirkan membuat orang lain ketakutan. Barangkali karena nilai budaya semacam ini pula muncul istilah regionalis dari orang Tengger yang menganggap dirinya sebagai *wong gunung* yang tidak pretensius dan terbuka (*blater*), yang berbeda dengan *wong ngure* yang terlalu formal, tidak ramah dan sadar status (Hefner, 1999).

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Masyarakat Jawa Timur memiliki keragaman budaya yang tumbuh dan berkembang dari dua budaya yang dominan di Jawa Timur yaitu budaya Jawa Mataraman dan budaya Madura. Budaya Jawa Mataraman tersebar di bagian barat-tengah wilayah Jawa Timur, sedangkan budaya Madura tersebar di Pulau Madura dan pulau-pulau sekitarnya serta Jawa Timur bagian utara-timur. Kedua budaya berakar pada tradisi yang berbeda yaitu tradisi masyarakat agraris (budaya Jawa Mataraman) dan tradisi masyarakat

maritim (budaya Madura). Di samping itu, karena aspek historis dan geografis juga terdapat variasi dari budaya Jawa yaitu, budaya Arek (*Suroboyoan*) yang tersebar di Surabaya dan sekitarnya, Osing yang tersebar di Banyuwangi dan Jember (dan Tengger di sekitar Pegunungan Bromo serta Samin di Bojonegoro), dan Pendalungan di sekitar Jember sebagai produk dari masyarakat Madura-Jawa.

Meskipun terdapat keragaman, masyarakat Jawa Timur memiliki nilai dasar yang sama yang menjadi orientasi utama dalam kehidupan sosial yaitu rukun. Nilai dasar ini terbentuk oleh kosmologi masyarakat, baik yang berasal dari budaya Jawa Mataraman yang berakar pada tradisi masyarakat maritim, yang memandang kehidupan manusia sebagai bagian dari dunia supranatural yang tidak bisa diramalkan. Inti dari pandangan ini adalah ajaran tentang keselamatan hidup. Nilai dasar rukun merupakan modal dasar bagi integrasi masyarakat, tetapi juga bisa dimanfaatkan sebagai "ideologi" untuk menolak realitas perbedaan.

Meskipun terdapat nilai dasar yang sama yaitu rukun, berdasarkan cara pandang atas realitas sosial dan aktualisasi diri dalam kehidupan sosial, keragaman budaya masyarakat Jawa Timur pendukung budaya Jawa Mataraman dan budaya Madura memiliki orientasi yang bersifat vertikal-hirarkis. Orientasi ini bisa menjadi penghambat proses kemandirian masyarakat atau demokratisasi. Sedangkan pendukung budaya Aceh, Osing dan Pendalungan memiliki orientasi yang bersifat horisontal-egaliter. Orientasi ini dapat menjadi pendorong proses

kemandirian masyarakat atau demokratisasi.

Selanjutnya, berdasarkan aktualisasi diri dalam kehidupan sosial terdapat dua orientasi yaitu terbuka dan tertutup. Masyarakat pendukung budaya Madura, Arek, Osing maupun Pendalungan memiliki cara aktualisasi yang bersifat terbuka. Orientasi ini juga bisa menjadi pendukung proses kemandirian masyarakat atau demokratisasi, sekaligus potensial memunculkan konflik. Sedangkan masyarakat pendukung budaya Jawa Mataraman cenderung bersifat tertutup. Orientasi ini bisa menjadi penghambat proses kemandirian masyarakat atau demokratisasi, sekaligus dapat menyembunyikan realitas konflik.

Rekomendasi

Mengingat masyarakat Jawa Timur secara kultural masih didominasi oleh orientasi nilai budaya yang bersifat vertikal-hirarkis, maka dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat, pemerintah hendaknya melibatkan langsung tokoh/panutan masyarakat setempat sehingga masyarakat merasa memiliki dan ikut memelihara hasil pembangunan tersebut. Kyai atau tokoh/panutan setempat harus diperankan secara sungguh-sungguh sebagai agen pembangunan masyarakat, dan bukan diperankan sebagai alat mobilisasi. Dalam konteks ini harus ada perubahan paradigma di pihak pemerintah dalam menempatkan kyai maupun tokoh-tokoh panutan masyarakat. Jika dalam konteks pembangunan selama ini pemerintah terkesan menggunakan paradigma "mobilisasi" sejalan dengan

model pembangunan "dari atas ke bawah" maka sudah seharusnya diubah dengan paradigma "partisipasi" sejalan dengan demokratisasi yang kini menjadi arus kuat di masyarakat.

Mengingat orientasi nilai budaya yang bersifat vertikal-hirarkis itu pula para pejabat pemerintah hendaknya berperilaku yang mendidik, dapat dijadikan contoh menuju masyarakat yang maju bersifat vertikal-hirarkis masyarakat akan dengan mudah menunjuk pada contoh. Dalam konteks ini pejabat pemerintah maupun pegawai di pemerintahannya diapresiasi sebagai panutan. Idealisasi masyarakat Jawa terhadap *priyayi* maupun ungkapan *bapak babuk, guru, rato* dalam masyarakat Madura sekaligus memberi tuntutan etis terhadap mereka yang dihormati itu. Dalam masyarakat yang demikian perubahan menuju ke arah kemajuan akan semakin mudah manakala mereka yang mendapatkan atau dianggap memiliki status tinggi dapat berpenampilan dan berperilaku yang meneladani.

Terhadap masyarakat yang orientasi budayanya bersifat horisontal-egaliter, pemerintah harus bekerja lebih keras lagi, karena tidak adanya pihak dari masyarakat yang bisa berperan sebagai penghubung. Pemerintah harus menemukan institusi yang bisa mempertemukan antara dirinya dan masyarakat. Orientasi nilai yang bersifat horisontal-egaliter sangat mendukung demokratisasi yang kini menjadi arus kuat di masyarakat. Masyarakat yang orientasi nilai budayanya demikian sangat mungkin memiliki tingkat kekritisan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah harus memanfaatkan

lembaga kemasyarakatan yang ada sebagai "mitra" baik untuk sosialisasi kebijakan pembangunan maupun untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Sehubungan dengan upaya kemandirian masyarakat dalam konteks demokratisasi, sifat terbuka (sebagai cara aktualisasi diri) yang menjadi ciri sebagian besar kultur masyarakat di Jawa Timur haruslah diapresiasi sebagai potensi kultural. Sifat ini sekaligus merupakan potensi konflik secara subyektif. Jika potensi konflik secara subyektif ini bertemu dengan potensi konflik yang obyektif yaitu perbedaan kepentingan, maka Jawa Timur akan menjadi daerah yang rawan konflik terbuka. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus bisa menghapus potensi konflik yang obyektif, bukan sebaliknya malah mereproduksi potensi konflik yang obyektif itu. Untuk itu, pemerintah harus mau bekerja keras melibatkan masyarakat secara penuh dalam proses pembangunan. Di samping itu, pemerintah perlu memiliki wawasan dan pengetahuan yang memadai tentang sumber-sumber konflik sosial di wilayah Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Fakih, Mansour, 2001, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insists Press.
- Hefner, Robert W, 1999, *Geger Tengger: Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik*, Yogyakarta : LkiS

Mackie, Jamie 1997, "Ekonomi Jawa Timur: Dari Dualisme ke Pembangunan Berimbang," dalam Howard Dick, dkk.(ed.), *Pembangunan Yang Berimbang, Jawa Timur dalam Era Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Nawiyanto, S., 1996, "Perekonomian Jember pada Masa Kolonial," dalam *Prisma*, No.9 Th.XXV, September 1996.

Soetoko, dkk., 1998, *Geografi Dialek Bahasa Madura*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Wiyata, A.Latif, 2001, "Carok: Institusional Kekerasan dalam Masyarakat Madura," *Disertasi*, Universitas Gadjah Mada.